P-ISSN: 1858-2168
E-ISSN: 2621-251X

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PUSJAR SKMP LAN

VOLUME XXI NOMOR 1 JUNI 2025

Penanggung Jawab:
Dr. Muhammad Aswad, M.Si.

***Journal Manager*:**
Andi Dirga Putra, S.IP., M.Sc.

Mitra Bestari:
Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MURP., Ph.D.
Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si.
Prof. Dr. Nurliah Nurdin., MA
Prof. Dr. Puji Lestari, M.Si.
Prof. Dr. Sangkala, M.Si.
Dr. Gita Susanti, M.Si.
Dr. Asropi S.IP, M.Si.
Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
Dr. St. Syamsudduha, M.Pd.
Dr. Rulinawaty, S.Sos., M.Si.
Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA, M.Sc.

***Section Editor*:**
Anita, S.Sos., M.Si.
Dr. Frida Chairunisa, M.Si.
Dr. Johan Tarru Mada, M.Si.
Ladiatno Samsara, S.IAN
Milawaty, S.S., M.M.
Dr. Novayanti Sopia Rukmana, S.Sos., M.Si.
Nurhuda Firmansyah, SKM., MAP
Sitti Khadijah Herdayani, S.Psi., MM
Syakib Arsalam, S.Hi, LL.M
Dr. Wahyu Nurdiansyah Nurdin, S.Sos., M.Si.

***Copy Editor & Layout Editor*:**
Andi Irsan Ismunandar, S.T., M.SP.
Anisa Mifrohatun Fathiyah, S.I.A., M.Sc.
Avrina Dwijayanti, S.IP., M.Phil.
Ayun Sri Damayanti, S.H., M.H.
Muhammad Iqbal, S.Sos., MA
Nur Khasanah Latief, S.IP.
Satria Eka Tri Laksana, S.IP., MAP
Yosafat, S.Ak.

Desain Grafis:
Anisa Mifrohatun Fathiyah, S.I.A., M.Sc.
Muhammad Iqbal, S.Sos., MA

Volume XXI Nomor 1 Juni 2025

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

PUSJAR SKMP LAN

Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan
Lembaga Administrasi Negara (Pusjar SKMP LAN)
Jl. Raya Baruga No. 48 Makassar, 90234
Tel.: (0411) 490101 | E-mail: jap@lan.go.id | URL: http://makassar.lan.go.id/jap

CALL FOR PAPER:
Redaksi menerima naskah hasil penelitian, analisis, kajian, pemikiran kritis, dan gagasan ilmiah dalam lingkup bidang administrasi publik yang belum diterbitkan di jurnal ilmiah lainnya. Naskah hendaknya diketik dalam Ms. Word menggunakan Bahasa Indonesia sepanjang 6000-8000 kata, ukuran A4, huruf Times New Roman ukuran 12, dan spasi 1,5. Abstrak ditulis dalam dwibahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) masing-masing sepanjang 100-200 kata. Naskah di-*submit* ke http: http://makassar.lan.go.id/jap. Redaksi berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi akan di-*review* oleh Mitra Bestari (*Peer-Reviewer*).

LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2025

P-ISSN: 1858-2168
E-ISSN: 2621-251X

JURNAL
ADMINISTRASI
PUBLIK
PUSJAR SKMP LAN

Volume XXI Nomor 1 Juni 2025
Hal. 1-187

1. **TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN LAYANAN DAN KEAMANAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DI INDONESIA: STUDI TERHADAP KEBIJAKAN BASIS DATA TERINTEGRASI** 1-31
Mochammad Ryaninditiyo, Koesmoyo Ponco

2. ***SMART GOVERNANCE* DI DAERAH PINGGIRAN: ANALISIS IMPLEMENTASI KOTA CERDAS DI KABUPATEN MANGGARAI** 32-61
I Putu Yoga Bumi Pradana, Arsenius Agung Reynold Baru, Delila Anggelina Nahak Seran

3. **MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM LAYANAN KEPENDUDUKAN: STUDI EMPIRIS TERHADAP IMPLEMENTASI IKD DI KABUPATEN GARUT** 62-86
Nimas Agung Yulianti, Rima Nur Illahi, Bunga Cantika

4. **IMPLIKASI KOMPETENSI DIGITAL APARATUR SIPIL NEGARA MILENIAL TERHADAP REFORMASI BIROKRASI DIGITAL DI ERA TRANSFORMASI PEMERINTAHAN** 87-109
Aris Sarjito, Sundring Pantja Djati

5. **EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN NILAI-NILAI BERAKHLAK TERHADAP *LEARNING ENGAGEMENT DAN EMPLOYEE ENGAGEMENT* STUDI KASUS DI PAPUA BARAT DAYA** 110-140
Nirwati Yapardy

6. **KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN POTENSI DESA DURIN TONGGAL KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG** 141-162
Siska Relingga Ginting, Muhammad Immanudin Kandias Saraan

7. **BAGAIMANA PEREMPUAN MEMPERSEPSI SATU SAMA LAIN DALAM POSISI BERKUASA: STUDI KASUS PEMILU LEGISLATIF** 163-187
Bulan Erika Bato, Iqbal Saputra Zana, Dyah Kuntorini Dwi Angreni, Desi Andreastuti, Dyah Rahayuning Perwitasari, Lara Ayu Lestari

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PUSJAR SKMP LAN

P-ISSN: 1858-2168
E-ISSN: 2621-251X Volume XXI Nomor 1 Juni 2025

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya *Jurnal Administrasi Publik* Volume XXI No. 1 Juni 2025. Edisi ini kembali hadir sebagai media diseminasi hasil penelitian, pemikiran kritis, dan kajian empiris di bidang administrasi dan kebijakan publik.

Pada edisi ini, kami menyajikan tujuh artikel yang merepresentasikan keragaman tema dan pendekatan penelitian dalam ranah administrasi publik di Indonesia. Tulisan pertama, karya Mochammad Ryaninditiyo dan Koesmoyo Ponco, membahas "Transformasi Digital untuk Meningkatkan Layanan dan Keamanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia" melalui studi terhadap kebijakan basis data terintegrasi. Artikel kedua berjudul *Smart Governance* di Daerah Pinggiran: Analisis Implementasi Kota Cerdas di Kabupaten Manggarai oleh I Putu Yoga Bumi Pradana, Arsenius Agung Reynold Baru, dan Delila Anggelina Nahak Seran.

Tulisan ketiga, oleh Nimas Agung Yulianti, Rima Nur Illahi, dan Bunga Cantika, mengkaji model penerimaan teknologi dalam layanan kependudukan, khususnya implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Garut. Artikel keempat, karya Aris Sarjito dan Sundring Pantja Djati, menelaah implikasi kompetensi digital aparatur sipil negara milenial terhadap reformasi birokrasi digital. Tulisan kelima memaparkan hasil penelitian salah seorang widyaiswara di Pusjar SKMP mengenai efektivitas pembelajaran nilai-nilai BerAKHLAK terhadap *learning engagement* dan *employee engagement* ASN peserta pelatihan di Papua Barat Daya. Artikel keenam, karya Siska Relingga Ginting dan Muhammad Imanuddin Kandias Saraan, mendiskusikan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam pengelolaan potensi desa Durin Tonggal di Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, artikel ketujuh oleh Bulan Erika Bato dan rekan-rekan mengangkat perspektif perempuan dalam posisi berkuasa melalui studi kasus pemilu legislatif.

Redaksi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penulis, mitra bestari, serta pihak-pihak yang telah mendukung proses penerbitan edisi ini. Kami juga mengundang para akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pemerhati kebijakan publik untuk turut berkontribusi dengan mengirimkan karya tulisnya pada edisi-edisi berikutnya. Semoga setiap artikel dalam jurnal ini dapat menjadi inspirasi, sumber pengetahuan baru, serta kontribusi nyata bagi pengembangan teori dan praktik administrasi publik di Indonesia.

Salam,

Redaksi

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PUSJAR SKMP LAN

P-ISSN: 1858-2168
E-ISSN: 2621-251X Volume XXI Nomor 1 Juni 2025

Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/*copy* tanpa izin dan biaya

Mochammad Ryaninditiyo & Koesmoyo Ponco

Transformasi Digital untuk Meningkatkan Layanan dan Keamanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia: Studi Terhadap Kebijakan Basis Data Terintegrasi

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI Nomor 1 Juni 2025, Hal. 1-31

Guna melindungi perbatasan negara dari dampak negatif akibat adanya migrasi global, maka Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia bekerja sama dengan International Criminal Police Organization (Interpol) dalam memanfaatkan basis data terintegrasi 'I-24/7' dan *Border Control Management* (BCM). Sistem interoperabilitas ini memungkinkan petugas imigrasi untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana implementasi dari kebijakan terintegrasi antara I-24/7 dengan BCM beserta faktor-faktor penghambatnya yang berdampak terhadap layanan dan keamanan di perbatasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap lima orang partisipan, observasi, dan kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait sistem yang terintegrasi sebagaimana yang disebutkan dalam MoU antara Kepolisian Negara RI dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia belum berjalan optimal. Beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan yang berhasil diidentifikasi antara lain adalah minimnya landasan hukum pelaksanaan kebijakan, personil yang kurang terlatih, terbatasnya jaringan dan basis data, terbatasnya diseminasi, serta keterbatasan keamanan platform. Faktor-faktor penghambat tersebut berdampak pada terganggunya layanan keimigrasian khususnya dalam waktu layanan pemeriksaan imigrasi, dan berpotensi mengancam keamanan negara Indonesia seperti masuknya orang yang tidak diinginkan di Indonesia. Rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya adalah dengan menyusun SOP yang mengatur tindakan terperinci petugas dalam menangani subjek yang ditemukan dalam *notice* sistem, meningkatkan kapabilitas personil Imigrasi dan Kepolisian RI dalam mengoperasikan sistem terintegrasi BCM-I-24/7, *upgrading* dan menambahkan *back-up* server perangkat keras agar sistem berjalan dengan optimal tanpa jeda, mengalihkan sistem komunikasi ke *platform* yang lebih aman dan tertutup untuk menjaga keamanan pertukaran data antara pihak Imigrasi, Kepolisian RI, dan Interpol.

Kata kunci: kebijakan; transformasi digital, keamanan perbatasan

I Putu Yoga Pradana, Arsenius Agung Reynold Baru, & Delila Anggelina Nahak Seran

Smart Governance di Daerah Pinggiran: Analisis Implementasi Kota Cerdas di Kabupaten Manggarai

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI Nomor 1 Juni 2025, Hal. 32-61

Penelitian ini membahas implementasi *smart governance* di Kabupaten Manggarai sebagai bagian dari konsep *smart city* di Indonesia. *Smart governance* merupakan elemen kunci dalam tata kelola kota cerdas, yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kabupaten Manggarai telah mengadopsi program *smart city* berdasarkan regulasi yang ditetapkan, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, dan pemahaman masyarakat yang rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pelaksanaan *smart governance*. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan utama, observasi langsung, serta analisis dokumen dan regulasi terkait. Teknik analisis data dilakukan dengan triangulasi untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai telah memiliki kerangka regulasi yang mendukung *smart governance*, termasuk Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2022. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, infrastruktur telekomunikasi, dan pemanfaatan teknologi oleh masyarakat. Upaya peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi antar-organisasi, serta optimalisasi infrastruktur digital menjadi strategi utama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan *smart governance* di Kabupaten Manggarai. Dengan perbaikan berkelanjutan, *smart governance* di Kabupaten Manggarai berpotensi memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital.

Kata kunci: s*mart governance*, daerah pinggiran, kota cerdas, implementasi, Manggarai

Nimas Agung Yulianti, Rima Nur Illahi, & Bunga Cantika

Model Penerimaan Teknologi dalam Layanan Kependudukan: Studi Empiris terhadap Implementasi IKD di Kabupaten Garu

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI Nomor 1 Juni 2025, Hal. 62-86

Proses tranformasi digital dalam layanan publik telah menghadirkan tantangan baru berkaitan dengan tingkat penerimaan teknologi di kalangan masyarakat, salah satunya dalam penerimaan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Oleh karena itu, peneltian ini bertujuan untuk mengalis faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan IKD khususnya di Kabupaten Garut melalui pendekatan TAM *(Technology Acceptance Model)*. Terdapat lima konstruk yang akan ditelaah, diantaranya *perceived ease of use, perceived usefulness, attitude toward using, behavioral intention to use, dan actual system usage.* Untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen berupa kuisioner. Terdapat 124 responden di dalam penelitian ini. Para responden terkurasi melalui teknik *purposive sampling* karena

peneliti memilih responden dengan pengetahuan seputar IKD saja. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hubungan antar variabel dalam model signifikan secara statistik. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan dan sikap terhadap penggunaan, yang selanjutnya memengaruhi niat dan perilaku aktual dalam menggunakan IKD. Temuan ini menegaskan bahwa model TAM dapat diterapkan secara efektif dalam konteks daerah dengan karakteristik sosial yang beragam. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat validitas model TAM serta memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi implementasi teknologi yang adaptif dan inklusif.
Kata kunci: identitas kependudukan digital; *e-government*, *technology acceptance model*

Aris Sarjito & Sundring Pantja Djati

Implikasi Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara Milenial terhadap Reformasi Birokrasi Digital di Era Transformasi Pemerintahan

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI Nomor 1 Juni 2025, Hal. 87-109

Transformasi digital dalam birokrasi pemerintahan Indonesia memerlukan kesiapan sumber daya aparatur yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif dan inovatif. Aparatur Sipil Negara (ASN) milenial yang dikenal sebagai generasi *digital native*, dinilai memiliki keunggulan dalam menghadapi tuntutan perubahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi kompetensi digital ASN milenial terhadap keberhasilan reformasi birokrasi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang dianalisis melalui teknik analisis isi tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi digital ASN milenial secara nyata berkontribusi dalam peningkatan efisiensi kerja birokrasi, percepatan adopsi teknologi dalam pelayanan publik, serta pembentukan budaya kerja baru yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan berorientasi pada hasil. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan struktural seperti resistensi dari budaya organisasi yang konservatif, sistem pelatihan yang belum kontekstual, serta keterbatasan ruang inovasi dan insentif terhadap kinerja digital. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu ASN, tetapi juga oleh keberadaan ekosistem birokrasi yang mendukung pembelajaran lintas generasi, kepemimpinan yang visioner, dan kebijakan internal yang responsif terhadap inovasi. Oleh karena itu, penguatan kompetensi digital ASN milenial harus menjadi bagian integral dari strategi reformasi birokrasi nasional yang berkelanjutan.
Kata kunci: ASN milenial, kompetensi digital, pelayanan publik digital, reformasi birokrasi, transformasi pemerintahan

Nirwati Yapardy

Efektivitas Pembelajaran Nilai-Nilai BerAKHLAK terhadap *Learning Engagement* dan *Employee Engagement* Studi Kasus di Papua Barat Daya

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI Nomor 1 Juni 2025, Hal. 110-140

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran nilai-nilai BerAKHLAK terhadap *learning engagement* dan *employee engagement* pada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Papua Barat Daya. Nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) diperkenalkan sebagai landasan karakter ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap tiga fasilitator dan enam alumni pelatihan dasar (latsar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran interaktif seperti permainan, diskusi kelompok, *problem-solving*, dan *roleplay* memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan keterlibatan peserta selama proses pelatihan. Selain itu, kesiapan fasilitator dan pemanfaatan teknologi pembelajaran turut memperkuat *engagement*, meskipun keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah terpencil, menjadi hambatan serius bagi pembelajaran daring. Pendekatan *blended learning* dinilai sebagai alternatif yang dapat mengatasi sebagian tantangan tersebut. Secara umum, pembelajaran nilai-nilai BerAKHLAK terbukti berkontribusi pada peningkatan *learning engagement* yang berdampak pada penguatan *employee engagement* di tempat kerja. Namun demikian, keberlanjutan dampak tersebut memerlukan dukungan dari pimpinan dan rekan kerja, serta tersedianya panduan aplikatif dalam implementasi nilai-nilai tersebut. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan peran fasilitator melalui pelatihan teknologi, penyediaan materi dalam format digital dan cetak, serta adaptasi pembelajaran terhadap kondisi geografis dan akses teknologi. Hasil ini menunjukkan pentingnya investasi berkelanjutan dalam strategi pembelajaran nilai-nilai BerAKHLAK untuk memperkuat keterlibatan ASN secara berkelanjutan.

Kata kunci: *learning engagement*, *employee engagement*, *value engagement*, nilai-nilai dasar ASN, nilai-nilai BerAKHLAK

Siska Ginting & Muhammad Immanudin Kandias Saraan

Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pengelolaan Potensi Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI Nomor 1 Juni 2025, Hal. 141-162

Bumdes yang didirikan masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan sumber daya alam, potensi sosial, dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa. Bumdes dapat berbentuk koperasi, perseroan terbatas (PT), atau bentuk usaha lainnya. Keuntungan dari usaha Bumdes dapat digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan, seperti pelatihan, bantuan modal, dan akses pasar, untuk pembentukan Bumdes. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia baik dalam bentuk pengalaman maupun pengetahuan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh Bumdes Sehati. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam Kapasitas Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Potensi Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang melalui unit usaha yang dikelola Bumdes. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan teknik analisis kualitatif guna menggambarkan fenomena sebenarnya dari kejadian dilapangan.

Hasil penelitian menunjukkan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sehati masih mengalami hambatan dalam pengelolaan potensi desa di Desa Durin Tonggal. Hal ini dapat dilihat sumber daya manusia yang belum memiliki profesionalitas dalam mengelola potensi desa yang disebabkan sebagian besar pengelola Bumdes adalah karyawan paruh waktu yang memiliki pekerjaan lain selain di Bumdes. Juga sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan masih belum memenuhi keperluan di tiap unit usaha. Dengan demikian, Bumdes Sehati perlu peningkatan kapasitas dalam pengelolaan potensi desa melalui program pengembangan kapasitas dengan menjalin kerjasama kepada pihak pemerintah maupun swasta, memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai dan meningkatkan pengawasan secara langsung.
Kata kunci: kapasitas; Bumdes; pengelolaan; potensi desa;

Bulan Erika Bato, Iqbal Saputra Zana, Dyah Kuntorini Dwi Angreni, Desi Andreastuti, Dyah Rahayuning Perwitasari, & Lara Ayu Lestari

Bagaimana Perempuan Mempersepsi Satu Sama Lain dalam Posisi Berkuasa: Studi Kasus Pemilu Legislatif

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI Nomor 1 Juni 2025, Hal. 163-187

Keterwakilan perempuan di parlemen didorong dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia, yang mencakup pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU No. 7/2017 tentang Pemilu pada Pasal 245 menyatakan bahwa daftar calon anggota legislatif harus memuat sekurang-kurangnya 30% perwakilan perempuan dan untuk setiap 3 orang calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Berdasarkan hasil pemilu dari tahun 1999 hingga 2019, keterwakilan perempuan secara keseluruhan dalam pemilu legislatif mengalami peningkatan. Namun tidak pernah mencapai angka 30% dari keseluruhan anggota legislatif, bahkan setelah undang-undang 30% diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan yang terpilih dalam kontestasi pemilu legislatif dari hasil pemilu masih perlu didorong secara maksimal. Norma sosial dan budaya yang masih cenderung patriarkis membatasi peran perempuan di ranah publik dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen, melalui komitmen dukungan partai politik dan partisipasi politik perempuan dalam memilih calon anggota legislatif dari keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif untuk memastikan hadirnya kebijakan yang mendukung, memberdayakan, dan memfasilitasi kebutuhan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur, di mana kami mengumpulkan dan menganalisis berbagai studi dan laporan yang relevan dari jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang diterbitkan dalam dua dekade terakhir. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pemilih perempuan tidak memprioritaskan untuk memilih anggota legislatif perempuan. Sistem kepartaian masih meremehkan pendidikan dan kaderisasi politik perempuan
Kata kunci: pemilu legislatif, pengarusutamaan gender, politik, keterwakilan perempuan

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PUSJAR SKMP LAN

P-ISSN: 1858-2168
E-ISSN: 2621-251X Volume XXI Number 1 June 2025

The abstract sheet may be reproduced/copied without permission or charge.

Mochammad Ryaninditiyo & Koesmoyo Ponco

Digital Transformation to Improve Service and Security at Indonesia's Passport Control: A Study of The Integrated Database Policy

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI No. 1 June 2025, Page 1-31

To protect its borders from negative impacts due to current global migration, the Directorate General of Immigration (DGI) of Indonesia cooperates with the International Criminal Police Organization (Interpol) to utilize an integrated database between the I-24/7 and Border Control Management (BCM). This interoperable system allows immigration officers to perform their duties more effectively and efficiently. This study aims to explore the extent of the implementation of the integrated BCM-I-24/7 system and its constraining factors and how they impact service and security at passport control. The research was conducted using a qualitative approach through interviews with five participants, observations, and literature studies. The results showed that the integrated system as stipulated in the MoU between the National Police and the DGI has not been running optimally. A number of constraining factors were identified, such as a lack of guidelines, untrained officials, limited network and database, limited dissemination, and a lack of secured communication platform. These constraining factors disrupts immigration service delivery especially regarding immigration clearance time and potentially threaten Indonesia's security by the entance of unwanted individuals in Indonesia. A number of recommendations were provided to tackle the issue, which includes: drafting SOPs that regulate officer's specific actions in handling subjects identified through the system, improving immigration and police officer's capability in operating the joint system, ugrading and adding back-up servers to ensure system optimalization, switching the communication system to a more secure platform to maintain data exchange security between immigration, police, and Interpol.

Keywords: *policy; digital transformation; border security*

I Putu Yoga Pradana, Arsenius Agung Reynold Baru, & Delila Anggelina Nahak Seran

Smart Governance in Peripheral Regions: Policy Implementation and Digital Constraints in Manggarai Regency, Indonesia

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI No. 1 June 2025, Page 32-61

This study discusses the implementation of innovative governance in Manggarai Regency as part of the brilliant city concept in Indonesia. Innovative governance is a key element in innovative city management, aiming to enhance effectiveness, efficiency, transparency, and public participation through information and communication technology. Manggarai Regency has adopted the innovative city program based on established regulations but faces various challenges, such as limited infrastructure, inadequate human resources, and low public understanding. This study uses a qualitative approach with a case study method to analyse the implementation of innovative governance. Data were obtained through interviews with key stakeholders, direct observation, and analysis of relevant documents and regulations. Data analysis was conducted using triangulation techniques to ensure the validity of the findings. The results show that Manggarai Regency has established a regulatory framework supporting innovative governance, including Regent Regulation No. 59 of 2022. However, implementation continues to face obstacles, particularly regarding the availability of skilled human resources, telecommunications infrastructure, and the public's use of technology. Efforts to improve human resource capacity, strengthen inter-organizational coordination, and optimize digital infrastructure are the main strategies needed to enhance the effectiveness of smart governance implementation in Manggarai Regency. With continuous improvement, innovative governance in Manggarai Regency has the potential to impact public service delivery and digital-based government administration positively.

Keywords: smart governance; peripheral regions; smart city; implementation, Manggarai

Nimas Agung Yulianti, Rima Nur Illahi, & Bunga Cantika

Technology Acceptance Model in Civil Registration Services: An Empirical Study on the Implementation of IKD in Garut Regency

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI No. 1 June 2025, Page 62-86

Digital transformation in Indonesia's public administration requires civil servants who are not only technologically literate but also adaptive and innovative in responding to institutional change. Millennial civil servants, often labeled as digital natives, possess inherent advantages to meet these demands. This study aims to explore in depth the implications of millennial civil servants' digital competence on the success of digital bureaucratic reform. It adopts a qualitative method with a descriptive approach using thematic content analysis of policy documents and academic publications as secondary data sources. The findings reveal that digital competence among millennial civil servants significantly contributes to improved bureaucratic efficiency, accelerated technology adoption in public service delivery, and the development of a more collaborative, flexible, and results-oriented work culture. However, structural challenges remain, such as resistance from conservative organizational cultures, insufficient contextualized training, and limited incentives for digital innovation. These obstacles indicate that successful digital bureaucratic reform requires more than individual capabilities—it also demands a supportive ecosystem that encourages intergenerational learning, visionary leadership, and innovation-oriented policies. Therefore, strengthening the digital competence of millennial civil servants must become an integral component of a long-term, sustainable national bureaucratic reform strategy.

Keywords: *millennial civil servants, digital competency, digital public service, bureaucratic reform, digital government transformation*

Aris Sarjito & Sundring Pantja Djati

The Effectiveness of the Affirmative Internship Program for West Papua Civil Servants in Supporting National Policies

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI No. 1 Juni 2025, Page 87-109

West Papua Province continues to face significant challenges in governance and development, as reflected in its low Human Development Index (HDI) and stagnating performance in the Government Institution Performance Accountability System (SAKIP). The Affirmative Internship Program, initiated by the National Institute of Public Administration (LAN), aims to enhance the competencies of Civil Servants (ASN), particularly fostering proactive, adaptive, and responsible behaviors. This program aligns with national policies such as the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and Presidential Instruction No. 9 of 2020, which focus on accelerating development in Papua and West Papua. This study evaluates the program's effectiveness in improving ASN behavioral competencies and assesses the relevance of participants' action plans to national development policies. Utilizing a mixed-method approach, the research combines quantitative data from questionnaires and qualitative insights from mentor observations and policy analysis. The results show that the program successfully enhanced participant competencies, particularly among those aged 30–39. Although women participants were fewer, they demonstrated performance equal to their male counterparts, while participants with a Master's degree achieved the highest scores. Participants' action plans were highly relevant to national policies and contributed to strategic development goals. In conclusion, the program effectively strengthened ASN capacity, supporting better governance and accelerated regional development in West Papua. To ensure long-term impact, increasing women's participation, developing tailored training modules for younger ASN, and implementing systematic evaluations are recommended.

Keywords: ASN Competency, Affirmative Internship Program, West Papua, National Policy, Governance.

Nirwati Yapardy

The Effectiveness of Core Values BerAKHLAK on Learning Engagement and Employee Engagement Case Study in Southwest Papua

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI No. 1 June 2025, Page 110-140

This study aims to evaluate the effectiveness of learning core values BerAKHLAK on learning engagement and employee engagement in Prospective Civil Servants (CPNS) in West Papua. The BerAKHLAK values (Service Oriented, Accountable, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) were introduced as the basis for ASN character in improving the quality of public services. This study used a qualitative approach with an in-depth interview method with three facilitators and six alumni of basic training (latsar). The results showed that interactive learning methods such as games,

group discussions, problem-solving, and roleplay have a major contribution to increasing participant engagement during the training process. In addition, the readiness of facilitators and the use of learning technology also strengthen engagement, although limited infrastructure, especially in remote areas, is a serious obstacle to online learning. The blended learning approach is considered an alternative that can overcome some of these challenges. In general, learning BerAKHLAK values has been shown to contribute to increasing learning engagement which has an impact on strengthening employee engagement in the workplace. However, the sustainability of this impact requires support from leaders and colleagues, as well as the availability of application guidelines in implementing these values. Research recommendations include strengthening the role of facilitators through technology training, providing materials in digital and printed formats, and adapting learning to geographic conditions and technology access. These results demonstrate the importance of continued investment in BerAKHLAK values learning strategies to strengthen ASN engagement sustainably.
Keywords: *learning engagement, employee engagement; value engagement, core values ASN, BerAKHLAK values*

Siska Ginting & Muhammad Immanudin Kandias Saraan

Capacity of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Managing the Potential of Durin Tonggal Village, Pancur Batu Subdistrict, Deli Serdang Regency

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI No. 1 June 2025, Page 141-162

BUMDes are established by village communities to enhance the village economy through the management of natural resources, social potential, and economic potential within the village. BUMDes can take the form of cooperatives, limited liability companies (PT), or other types of enterprises. The profits generated by BUMDes businesses can be used to finance village development and improve community welfare. A major challenge faced by BUMDes Sehati is the limited quality of human resources, both in terms of experience and knowledge. This study aims to provide an in-depth description of the capacity of Village-Owned Enterprises in managing the potential of Durin Tonggal Village, Pancur Batu Subdistrict, Deli Serdang Regency, through business units managed by BUMDes.The research method used in this study is a descriptive research method with a qualitative analysis technique to illustrate the actual phenomenon occurring in the field. The results of the study indicate that the capacity of BUMDes Sehati still faces obstacles in managing the village's potential in Durin Tonggal Village. This is evident from the fact that human resources lack professionalism in managing village potential, as most BUMDes managers are part-time employees with other jobs outside BUMDes. Additionally, financial resources to support implementation activities are still insufficient to meet the needs of each business unit. Therefore, BUMDes Sehati needs capacity-building improvements in managing village potential through capacity development programs by establishing cooperation with the government and private sectors, providing training to all employees, and enhancing direct supervision.
Keywords: capacity, Bumdes, management, v*illage potential management*

Bulan Erika Bato, Iqbal Saputra Zana, Dyah Kuntorini Dwi Angreni, Desi Andreastuti, Dyah Rahayuning Perwitasari, & Lara Ayu Lestari

How Do Women Perceive Each other in a Position of Power
A Case Study of The Legislative Election

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI No. 1 June 2025, Page 163-187

This study aims to explore the factors that influence the low representation of women in Indonesian legislative elections, despite the implementation of a 30% quota policy in Law No. 7/2017. The research question posed is, 'What factors contribute to the low representation of women despite the quota policy?' The role of political parties in supporting female candidates and the preferences of female voters who do not prioritise female candidates are the main factors hindering women's representation in parliament. The method used is a literature review, which involves analysing recent studies and relevant reports from scientific journals, books, and other reliable sources. Selection criteria include articles discussing gender quotas, women's political participation, and other countries' experiences in increasing women's representation in parliament. The analytical framework uses thematic analysis to identify factors influencing women's representation. The research findings show that although the number of female candidates has increased, only 22.01% were elected as legislators. Female voters tend not to prioritise female candidates, which is caused by money politics and the patriarchal culture that still dominates, as well as the placement of women in non-strategic positions on the list of legislative candidates. This study emphasises the need for stronger political party support and political education to strengthen women's representation in parliament.
Keywords: *gender mainstreaming, legislative election, politics, women's representation.*